

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Usulan Anggaran 2020 Disepakati Rp87,95 T

**JAKARTA (Pos Kota) - Usulan anggaran dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 disepakati sebanyak Rp87,95 triliun.**

Peliput: John

Besaran ini disahkan oleh Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembahasan yang cukup alot selama kurang lebih lima jam.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp 87,956,148,476,363 disahkan," ucap Ketua DPRD DKI, Prasetio

Edi Marsudi sambil mengetuk palu di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Berbagai dinamika terjadi dalam rapat termasuk pandangan dan kritikan anggota DPRD DKI terhadap realisasi penerimaan pajak tahun 2019.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta

“ Setelah Melalui Pembahasan Alot Selama 5 Jam ”

Faisal Syafruddin berkali-kali diminta menjelaskan perihal pendapatan sektor pajak yang belum optimal.

Pasalnya, pendapatan ini sangat menentukan jumlah dan kesanggupan Pemprov DKI untuk membiayai pengajuan anggaran DKI di tahun 2020. Untuk itu anggaran dalam

KUA-PPAS dinaikkan menjadi Rp 87,95 triliun, dari prediksi sebelumnya sebesar Rp 87,12 triliun.

Jika besaran anggaran naik, sudah dipastikan beberapa daerah harus digenjut. Sesuai kesepakatan, ada lima sektor pajak yang garus dinaikkan realisasi penerimaannya.

Pertama, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) harus menambah pendapatan sebanyak Rp100 miliar dari sebelumnya.

Selanjutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PB-BKB) ditambah Rp 50

miliar. Kemudian, pajak hotel menjadi Rp50 miliar. Pajak parkir ditambah Rp 250 miliar, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) ditambah Rp 200 miliar. "Ini semua dinaikkan, artinya dewan memberikan semangat kepada BPRD untuk bisa mendongkrak kembali pendapatan kita," kata Prasetio.

Sisanya, Pemprov DKI diminta untuk menaikkan pendapatan retribusi daerah. Setelah ini, anggaran dikembalikan kepada para satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukkan detail pada tiap mata anggaran. (ruh)